



Sekolah Belum Mulai Gulirkan Makan Bergizi Gratis

YOGYA, TRIBUN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat mulai berlangsung di berbagai daerah, Senin (5/1). Namun, khusus di Kota Yogyakarta, berdasar hasil pemantauan sejauh ini, sekolah-sekolah belum mulai menggulirkan program tersebut.

Plh Kepala SMP Negeri 4 Yogyakarta, Supriyati, mengungkapkan, pihaknya belum menerima petunjuk teknis terkait pelaksanaan MBG dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Namun, ia menyebut, pendataan pernah dilakukan, menyangkut jumlah siswa di tiap sekolah, hingga pengalangan menyelenggarakan kegiatan serupa sebelumnya.

"Sudah ada pendataan, itu kemarin tanggal 30 Desember," ujarnya, Senin (6/1).

Menurutnya, sekolah pun menyambut baik program tersebut, karena sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa-siswinya. Akan tetapi, dalam hal penyediaan makanan yang hendak dibagikan, ia berharap, pemerintah tidak membebarkannya pada pihak sekolah.

"Kalau suruh masak sendiri, ya belum siap. Sekarang kita juga belum dapat (juknis) apa-apa. Kami juga belum berani untuk ke sana (komunikasi dengan komite)," terangnya.

Setali tiga uang, Wakil Kepala Bidang Sarpras dan Humas SMP Negeri 6 Kota Yogya, Widawati, berujar, sekolahnya belum pernah disasar uji coba MBG. Hanya saja, penyelenggaraan makan bersama siswa-siswi di sekolah secara serentak sudah berulang kali dilakukan, dengan pengadaan secara mandiri.

"Makan bergizi bersama pernah, tapi anak-anak bawa sendiri. Itu sudah biasa kami laksanakan. Tapi, kalau makan siang dari ke-menterian, itu belum ada," ungkapnya.

Tidak menyengol
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memastikan bahwa persiapan anggaran untuk program makan bergizi gratis dirancang tanpa menyengol anggaran lain.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Jumakir, menyampaikan, anggaran untuk program makan bergizi gratis sengaja sudah dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu, walaupun belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.



"Anggaran itu kami siapkan bilamana dibutuhkan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Maka, persiapannya dilakukan untuk anggaran belanja tidak terduga (BTT). Jadi, persiapan anggaran itu 100 persen tidak menyengol anggaran kebutuhan lainnya," katanya kepada tribunjogja.com.

Adapun besaran anggaran program makan bergizi gratis pada tahun 2025 yang dipersiapkan adalah sekitar Rp30-an miliar. Anggaran itu turun dari jumlah pembahasan sebelumnya yang mencapai Rp52 miliar. Di mana, nominal Rp30-an miliar didapatkan dari basic perhitungan sembilan persen pendapatan asli daerah di luar pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Lanjutnya, apabila ada anggaran belanja daerah Kabupaten Bantul tahun 2025 yang dipangkas atau diberlakukan efisiensi dari usulan sebelumnya, itu terjadi dikarenakan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 dari 7,6 persen menjadi 5,4 persen.

"Saat pembahasan APBD final kami laporkan atau minta evaluasi ke Gubernur DIY, kan itu kita defisit di angka 7,6 persen. Dan evaluasi Gubernur DIY harus turun, jadi kita defisit di angka 5,4 persen," papar Jumakir.

Akhirnya, dari situ terdapat efisiensi program beberapa di antaranya tidak diadakan kenaikan gaji aparatur sipil negara, tidak diadakan pembelian kendaraan mobil dinas untuk beberapa pejabat terkait, pengurangan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) Sekretariat DPRD Bantul dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja, berujar, bahwa rasionalisasi APBD tahun 2025 sudah sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur DIY yang tercantum dalam Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024.

"Beberapa catatan dari Keputusan Gubernur itu telah kami lakukan. Kami lakukan rasionalisasi anggaran, utamanya dalam anggaran perjalanan dinas dan beberapa pos lainnya," ungkap Agus.

Pihaknya turut sepakat dengan tidak adanya penganggaran kenaikan gaji ASN dengan nominal menyentuh Rp55 miliar. Sampai saat ini belum ada peraturan presiden yang mengatur terkait kenaikan gaji. Namun, bila sudah ada, mandatori tersebut, maka pihaknya akan melaksanakannya. **(nei/aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005